



penegak dan pendorong umat membangun kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Sebagai amanallah 'ala khalqihi (kepercayaan Allah atas makhluknya), ulama menjadi pembimbing dan penuntun umat ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebagai waratsatul-anbiya' (ahli waris para nabi), ulama adalah pemegang estafet perjuangan para nabi dalam menyiarkan dan melestarikan risalah ilahiyah. (K.H. Drs. Badruddin Hsubky, 1995 : Sambutan Ketua MUI).

Sejarah menunjukkan bahwa pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan ulama. Dengan keikhlasan dan sesungguhnya hati, mereka membimbing umat kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian umat memperoleh kesejahteraan lahir bathin di dunia dan akhirat. Para ulama berperan penting menegakkan umat dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Keberadaan ulama telah teruji dalam proses panjang dalam pergaulan masyarakat. Ucapan mereka di dengar dan prilaku mereka di tiru, karena kearifan dan kebaikan prilaku panutan umat inilah, masyarakat memberikan gelar kehormatan kepadanya, seperti kyai, tuan guru, buya dan ajengan. (K.H. Drs. Badruddin Hsubky, 1995 : Sambutan Ketua MUI)





dirinya dan orang lain dengan menyeru dan memanggil manusia untuk berbakti kepada Allah SWT. Secara lahir bathin. Dan ulama yang membinasakan dirinya tetapi menyelamatkan orang lain, pada lahirnya ia memanggil manusia untuk mengerjakan kebaikan, tetapi secara diam-diam dia sendiri hanya mengejar-ngejar harta untuk mencapai kekayaan dan kedudukan dunia. Maka hendaklah kita mengoreksi diri masing-masing termasuk kedalam golongan manakah diantara macam ulama itu. (Syaiikh Abdul Aziz Al Badri, 1991 : 63)

Sedangkan peranan ulama dalam kepemimpinan nasional, ulama diharapkan agar bisa berada di tengah-tengah masyarakat, ini bisa berperan sebagai kekuatan moral. Sebagai kekuatan moral diharapkan mereka bisa memberikan dukungan positif terhadap kepemimpinan tersebut. Tentu saja sikap kritis yang dilakukan ulama ini, masih dalam batas-batas tradisi dan kebudayaan yang dimilikinya. Yang terpenting sebagai kekuatan moral yang berada di tengah-tengah umat, ulama tidak mendorong untuk menjadikan agama sebagai legitimasi negara, tetapi tidak menghambat terhadap jalannya proses-proses negara.

Dalam kehidupan bernegara, ulama sebagai salah satu warga negara yang baik, diuntut untuk ikut serta menciptakan kondisi yang dinamis dan akomodatif terha-

dap stabilitas nasional. Di Indonesia stabilitas nasional dikaitkan dengan ketahanan nasional, sehingga ketahanan nasional akan berada dalam bahaya apabila tidak tercapai suatu integrasi antara kebudayaan dan agama, karena apabila dua unsur itu terpisah maka tentu ada ketegangan dan ketidakserasian dan hal itu akan melupuhkan mereka. (Franz Magnis Suseno, 1988 : 83).

Dengan demikian suatu built-in mechanism harus diciptakan dalam masyarakat Indonesia untuk mengurangi vulnerability masyarakat dan bangsa Indonesia serta menciptakan kemampuan untuk mengembalikan masyarakat kepada kondisi keseimbangan yang dinamik, kepada kondisi homeostasis.

Sebagaimana kemerdekaan dan kedaulatan merupakan suatu nilai kehidupan kenegaraan yang harus di capai melalui ikhtiar dan perjuangan, maka "ketahanan nasional" sebagai pemilikan suatu potensi untuk survival, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, untuk mengurangi gejolak-gejolak yang bersumber pada kekuatan baik di luar atau di dalam sistem, perlu diusahakan secara terarah, terencana dan berkesinambungan. Hal ini ditekankan karena dengan kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat itu sendiri maka magnetude, intensitas, bentuk dan potensi gangguan tadi juga mengalami peningkatan. Gangguan pada eksistensi dan

stabilitas suatu masyarakat dan negara tidak lagi semata-mata berbentuk military warfare, akan tetapi dapat pula berbentuk economic warfare, psy-war, atau war of mind (Sutopo Yuwono, 1981 : p.9). Bentuk dominasi sebagai produk akhir gangguan terhadap eksistensi tadi tidak lagi semata-mata berbentuk dominasi militer, akan tetapi dapat pula berbentuk depedensi ekonomi, depedensi politik, depedensi teknologi dan depedensi kultural. (Prof. DR. Moeljarto T. MPA, 1993 : 85).

Dengan demikian ulama sebagai salah satu warga negara, tidak boleh mengasingkan diri dari arus perubahan zaman. Mereka sangat dibutuhkan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Hendaknya mereka menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah (umaro) selaku pelaksana pembangunan. Silaturrahi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ini perlu dikembangkan pada semua tingkat dari tingkat desa sampai tingkat Internasional. Peran ulama dan umaro' dalam pelaksanaan pembangunan 25 tahun mendatang lebih meningkat lagi. Pelaksana utama program pembangunan 25 tahun mendatang, sebagai tercantum dalam GBHN 1993, adalah rakyat, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pencipta kondisi, pembimbing dan pengarah. (K.H. Drs. Badruddin Hsubky, 1995 : 80).











